

TUDUHAN PALSU MAHKAMAH AGAMA ATAS PENGADILAN YESUS MENURUT MATIUS 26:57-68 DAN RELEVANSINYA TERHADAP MARAKNYA INFORMASI PALSU DALAM DUNIA DIGITAL

Yulius Defri Sudi, Gregorius Tri Wardoyo
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
yuliussudi858@gmail.com
gtricm@gmail.com

Abstract

Matthew 26:57–68 presents one of the darkest moments in the story of Jesus' suffering, namely when He was brought before the Sanhedrin and falsely accused by false witnesses. This event reflects the tension between divine truth and human falsehood rooted in self-interest, envy, and manipulation of power. The false accusations directed at Jesus not only reflect the practices of religious injustice at that time, but also reveal the universal reality of human tendencies to distort facts for certain interests. In the context of the modern world, this phenomenon finds its relevance again in the form of the spread of false information or hoaxes in the digital world. Hoaxes circulating on social media often arise from similar motives, namely the drive for power, group interests, and the desire to shape public opinion through lies. Using an exegetical approach to the text of Matthew 26:57-68 and contextual reflection, this article attempts to explore the theological meaning of the false accusations against Jesus, then draw ethical and pastoral implications for the lives of Christians amid the current flood of false information. The results of this study show that the truth of Christ is the moral foundation that guides believers to be critical, honest, and responsible in facing the era of digital disinformation.

Keywords: *false accusations; Jesus Christ; Religious Court; digital hoaxes; ethics of truth*

I. PENDAHULUAN

Peristiwa penangkapan dan pengadilan Yesus di hadapan Mahkamah Agama sebagaimana dicatat dalam Matius 26:57-68 merupakan salah satu episode paling tragis dalam sejarah keselamatan. Ketragisannya terletak pada rekayasa kesaksian dusta yang dimunculkan oleh para saksi palsu yang sudah disiapkan oleh Mahkamah Agama (Anjaya., dkk, 2021:6). Para imam kepala dan tua-tua yang berupaya menjalankan proses peradilan Yesus didasari pada tuduhan palsu yang

disertai dengan pelaksanaan yang tergesa-gesa, hanya demi membenarkan keputusan yang sebenarnya telah diambil sebelumnya bahwa Yesus harus mati.

Teks ini bukan sekadar kisah historis tentang pengadilan seorang guru dari Nazaret, tetapi juga menjadi cermin mendalam tentang bagaimana kebenaran dapat diputarbalikkan oleh kuasa dan kepentingan. Mahkamah Agama yang seharusnya menjadi lembaga penjaga hukum dan kebenaran, justru menjadi alat legitimasi bagi kebohongan yang disusun untuk menyingkirkan pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak politik dan religius mereka. Konteks historis pada Matius 26:57-68 menunjukkan bahwa Yesus dihadapkan pada Sanhedrin pada malam hari, waktu yang tidak lazim bagi proses peradilan Yahudi (Pidyarto, 2018:130). Hal ini sudah menandakan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang sah.

Dari sudut pandang teologis, peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kebenaran ilahi ditolak oleh struktur religius yang korup, dan bagaimana Kristus tetap teguh dalam kebenaran meskipun harus menanggung penderitaan. Fenomena tuduhan palsu terhadap Yesus memiliki kemiripan mendalam dengan situasi sosial kontemporer yang diwarnai oleh penyebaran informasi palsu (hoaks) di dunia digital. Dunia modern, dengan kemajuan teknologi komunikasinya telah menciptakan ruang baru bagi kebohongan untuk berkembang dengan cepat dan masif. Informasi palsu di media sosial sering kali dibuat dengan motif yang sama seperti pada zaman Yesus, yakni mempertahankan kekuasaan, menjatuhkan lawan, atau membentuk persepsi publik berdasarkan kebohongan.

Jika pada masa Yesus, fitnah disebarakan melalui kesaksian palsu yang diatur oleh lembaga keagamaan, maka pada masa kini, fitnah digital tersebar melalui algoritma media sosial yang memperkuat konten sensasional tanpa verifikasi. Dalam kedua konteks tersebut, kebenaran menjadi korban dari kepentingan. Realitas penyebaran hoaks di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Apa yang membuat khawatir adalah penyebaran berita palsu itu tidak cuma membodohi masyarakat dengan sajian informasi yang tidak benar, namun tindakan tersebut juga dipakai pihak-pihak tertentu untuk menghasut dan memecah belah masyarakat dan pada gilirannya akan membahayakan sendi-sendi persatuan bangsa (Siswoko, 2017:13).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberikan sejumlah data mengenai berita palsu yang tersebar di dunia maya, yang melalui data tersebut menunjukkan betapa penyebarannya meningkat signifikan setiap tahunnya. Terhitung sejak Agustus 2018 hingga akhir tahun 2023, Kemenkominfo telah menangani sebanyak 12.547 konten yang berisikan berita palsu atau hoaks. Sementara sepanjang tahun 2023, Kemenkominfo menangani sebanyak 1.615 konten isu hoaks yang beredar di situs web dan platform digital. Jumlah isu hoaks yang ditangani Tim Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo pada tahun 2023 lebih banyak dibandingkan tahun

2022, yakni sebanyak 1.528 isu. Berdasarkan kategori, hingga Desember 2023, isu hoaks paling banyak berkaitan dengan sektor kesehatan, yakni sebanyak 2.357 (Kemenkominfo, 2023).

Oleh karena itu, kajian terhadap Matius 26:57-68 tidak hanya penting secara teologis, tetapi juga relevan secara etis dan pastoral bagi kehidupan umat Kristiani di era digital. Penelitian ini sangat penting dan baru karena berupaya mengisi celah antara studi Alkitab biblis naratif dan isu-isu etika komunikasi kontemporer. Beberapa penelitian yang mengulas perikop tentang pengadilan Yesus dalam Matius 26:57-68 sering dibaca dari perspektif historis-kritis, terutama terkait penderitaan dan ketidakadilan yang dialami Yesus, tanpa secara eksplisit menganalisis mekanisme tuduhan palsu secara kritis. Hingga saat ini, belum ada studi mendalam yang menggunakan pembacaan hermeneutis kontekstual dari Matius 26:57-68 sebagai landasan teologis dan etis spesifik untuk menangani disinformasi digital dalam konteks Indonesia.

Faktanya, teks ini mengungkapkan pola sistematis penyebaran kesaksian palsu yang diinstitutionalisasi oleh otoritas agama demi melegitimasi kekuasaan. Kesenjangan ini menjelaskan keunikan artikel ini. Artikel ini mengintegrasikan eksegesis Alkitab dan etika digital kontemporer dengan menafsirkan tuduhan palsu terhadap Yesus sebagai paradigma awal disinformasi terstruktur, sehingga menawarkan kerangka teologis-etis Kristen yang khas untuk merespons penyebaran informasi palsu di ruang publik digital Indonesia saat ini.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kajian Teoretis

2.1.1 Konteks Historis

Perikop Matius 26:57-68 menggambarkan peristiwa penangkapan dan pengadilan Yesus di hadapan Imam Besar Kayafas dan para anggota Mahkamah Agama, sebelum diserahkan kepada Pontius Pilatus. Secara historis, peristiwa ini terjadi pada malam sebelum penyaliban Yesus, setelah perjamuan malam terakhir bersama para murid, diperkirakan sekitar tahun 30-33 M di Yerusalem. Teks ini merupakan bagian dari rangkaian kisah sengsara yang menjadi puncak Injil Matius, di mana penderitaan Yesus menyingkapkan identitas-Nya sebagai Mesias sejati dan Anak Allah. Pada waktu itu, bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi, namun tetap mempertahankan otonomi keagamaan melalui lembaga Sanhedrin, yakni dewan tertinggi Yahudi yang terdiri dari imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua bangsa (Keener, 2009:626-629).

Sanhedrin berwenang mengadili persoalan agama dan moral berdasarkan hukum Taurat, tetapi tidak memiliki kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati tanpa persetujuan Romawi (Yoh 18:31). Karena itu, pengadilan terhadap Yesus di rumah Kayafas lebih bersifat proses keagamaan yang berupaya menemukan dasar hukum

untuk menuduh-Nya sebagai penghujat dan penyebar ajaran sesat. Secara sosial, pengadilan malam hari seperti yang digambarkan Matius (26:57-68) dianggap tidak lazim menurut hukum Yahudi. Tradisi hukum menuntut bahwa sidang pengadilan tidak boleh diadakan pada malam hari atau pada hari raya. Namun, fakta bahwa Yesus ditangkap pada malam perayaan Paskah menunjukkan bahwa pengadilan ini bersifat tergesa-gesa dan politis, dengan tujuan utama mencari legitimasi religius untuk menyerahkan-Nya kepada otoritas Romawi.

Kesaksian palsu yang disebutkan dalam Matius 26:59-60 memperkuat pandangan bahwa keputusan menjatuhkan hukuman mati sudah ditentukan sebelumnya (Brown, 1994:340-342). Selain itu, keberadaan Petrus yang mengikuti dari jauh (ay. 58) menjadi saksi bagaimana sistem keagamaan Yahudi yang berlandaskan hukum dapat berbalik menjadi alat ketidakadilan. Adegan penolakan Yesus oleh Petrus yang mengikuti kemudian (ay. 69-75) memperlihatkan kontras antara keberanian semu murid dan kekuasaan religius yang menolak kebenaran. Dengan demikian, secara historis, Matius 26:57-68 mencerminkan konfrontasi antara Yesus dan struktur religius Yahudi yang bersekongkol dengan kekuasaan politik Romawi. Pengadilan di hadapan Kayafas bukan sekadar proses hukum, melainkan titik balik sejarah keselamatan, di mana Sang Mesias ditolak oleh bangsanya sendiri, sesuai nubuat para nabi (Yes 53:3).

2.1.2 Konteks Teologis

Konteks teologis dari Matius 26:57-68 berakar pada teologi keagamaan Yahudi abad pertama, yang membentuk cara para pemimpin agama menilai dan akhirnya menolak Yesus. Bagi orang Yahudi, iman dan identitas mereka dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu: hukum Taurat, Bait Allah, dan sistem keimanan. Ketiganya dianggap sebagai wujud konkret dari kehadiran dan kehendak Allah di tengah umat. Dengan demikian, siapa pun yang tampak mengancam ketiganya akan dianggap melawan Allah sendiri (Jeremias, 1969:196-200). Dalam kerangka ini, tindakan Yesus, yang menafsirkan hukum Taurat dengan otoritas pribadi, mengkritik pemimpin agama, dan berbicara tentang kehancuran Bait Allah, dianggap subversif secara teologis. Bagi para imam dan ahli Taurat, otoritas ilahi tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa.

Teologi Yahudi menegaskan keesaan Allah (Ul 6:4) dan karena itu, ketika Yesus mengaku sebagai Anak Allah (Mat 26:63-64), pernyataan itu dipandang sebagai penghujatan. Dalam hukum Taurat, penghujatan terhadap nama Allah dihukum mati (Im 24:16). Maka, jawaban Yesus di hadapan Imam Besar, “Engkau telah mengatakannya”, bukan sekadar pengakuan pribadi, tetapi deklarasi teologis bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Manusia yang akan duduk di sebelah kanan Allah (Mat 26:64). Bagi Kayafas dan anggota Sanhedrin, ucapan itu adalah bentuk klaim ilahi yang tidak bisa diterima dalam sistem monoteisme Yahudi. Inilah yang

memicu reaksi keras yang termanifestasi dalam tindakan Kayafas yang merobek pakaian atau jubah dan menyatakan Yesus bersalah karena menghujat Allah (Pidyarto, 2018:136). Merobek pakaian atau jubah merupakan tanda kesedihan yang mendalam.

2.1.3 Informasi Palsu dalam Dunia Digital dan Faktor yang Mendasarinya

Fenomena produksi informasi palsu dapat dipahami sebagai hasil dari pergeseran struktur komunikasi dari media konvensional menuju media digital. Jika pada masa sebelumnya media massa berfungsi sebagai penjaga gerbang informasi (*gatekeeper*), kini setiap individu memiliki kebebasan untuk menjadi penerbit sendiri tanpa melewati proses verifikasi fakta yang ketat. Hal ini menimbulkan ledakan informasi yang tidak terkontrol dan menciptakan *infodemic*, yakni keadaan di mana informasi yang salah menyebar lebih cepat daripada klarifikasinya (Nurudin & Irwansyah, 2020:145-160).

Dunia digital modern telah menjelma menjadi ruang produksi informasi yang nyaris tak terbatas. Informasi palsu, baik dalam bentuk berita bohong, manipulasi gambar, maupun ujaran provokatif tidak lagi merupakan tindakan individu yang terisolasi, melainkan bagian dari suatu sistem sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Beberapa informasi palsu yang tersebar dalam media sosial terkonkretisasi dalam beberapa model dan bentuk, istilah-istilah tersebut antara lain: pertama, misinformasi yaitu kesalahan tanpa niat jahat, disinformasi yaitu kebohongan yang disengaja, model mirip tuduhan palsu yang dilakukan oleh mahkama agama, malinformasi yaitu menggunakan informasi asli untuk menyakiti.

Kedua, konsep ruang gema (*echo chambers*) dan gelembung filter (*filter bubbles*) membantu menjelaskan mengapa informasi palsu di dunia digital dapat menyebar dengan cepat dan memperoleh legitimasi meskipun tidak didukung oleh fakta (Zabieno, Damayanti, & Abdullah, 2025:1127). Ruang gema merujuk pada lingkungan sosial atau komunikasi di mana individu secara dominan terpapar pada pendapat, narasi, dan informasi yang memperkuat keyakinan mereka yang sudah ada, sementara pandangan yang bertentangan secara aktif diabaikan atau didiskreditkan. Gelembung filter, di sisi lain, adalah kondisi yang dibangun secara algoritmik di mana platform digital secara selektif menyaring konten berdasarkan perilaku, preferensi, dan kecenderungan ideologis pengguna sebelumnya, sehingga memperkecil jangkauan informasi yang diakses.

Secara struktural, kedua mekanisme ini menciptakan sistem epistemik yang tertutup, yakni kebenaran tidak lagi dievaluasi melalui verifikasi terbuka, melainkan melalui kesesuaian dengan asumsi dominan dalam kelompok. Motif utama produksi informasi palsu sering kali bersifat instrumental, misalnya ekonomi dan politik. Dalam dunia digital, perhatian publik memiliki nilai ekonomi yang tinggi, semakin banyak klik dan tayangan, semakin besar pula pendapatan iklan

yang diterima. Akibatnya, banyak pihak secara sadar menciptakan narasi palsu untuk menarik perhatian pengguna (Sumarno, 2021:22-35). Di sisi lain, informasi palsu juga menjadi senjata politik yang efektif.

Di tengah persaingan ideologis dan elektoral, hoaks digunakan untuk membentuk opini publik, menurunkan kredibilitas lawan, dan mengarahkan persepsi massa (Nurdin, 2021). Fenomena ini memperlihatkan bahwa dunia digital telah menjadi medan baru bagi perebutan makna dan kebenaran. Selain faktor ekonomi dan politik, produksi informasi palsu juga berakar pada faktor psikologis dan sosiokultural. Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan untuk mempercayai informasi yang selaras dengan pandangan dan keyakinannya sendiri. Dalam konteks media sosial, keyakinan ini diperkuat oleh algoritma yang menyajikan konten sesuai preferensi pengguna (Alim & Hidayat, 2022:55–70). Akibatnya, masyarakat lebih mudah menerima kebohongan yang menenangkan daripada kebenaran yang menantang. Dalam kerangka ini, produksi informasi palsu bukan sekadar tindakan manipulatif, tetapi juga hasil dari mekanisme psikologis yang kompleks.

Dari sisi teknologi, kehadiran kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mempercepat produksi dan distribusi informasi palsu secara masif. Melalui teknologi *deepfake*, bot otomatis, dan sistem generatif berbasis algoritma, konten palsu dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan tingkat realisme yang tinggi (Leliana., dkk, 2023:234-243). Hal ini menjadikan dunia digital tidak lagi hanya ruang komunikasi manusia, tetapi juga ruang yang dikuasai mesin. Ketika algoritma berperan sebagai pengatur arus informasi, maka kebenaran tidak lagi ditentukan oleh validitas data, melainkan sejauh mana konten tersebut mampu memancing emosi dan keterlibatan pengguna.

Dalam sistem semacam ini, kebohongan memperoleh keuntungan struktural karena lebih mudah memancing reaksi emosional dibandingkan kebenaran yang memerlukan perenungan. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat turut memperparah situasi ini. Banyak pengguna internet belum memiliki kemampuan kritis dalam menilai sumber dan isi informasi yang mereka konsumsi (Dimasejati, 2021:44-59). Kurangnya pendidikan literasi digital menyebabkan sebagian besar pengguna menjadi bagian dari rantai produksi hoaks tanpa disadari, misalnya dengan membagikan ulang pesan yang belum terverifikasi.

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi eksegetis dan refleksi kontekstual. Studi eksegetis secara konkret menggunakan analisis historis-kritis. Analisis historis-kritis dalam Injil Matius 26:57-68, menempatkan narasi tentang tuduhan palsu terhadap Yesus dalam konteks historis, hukum, dan sosio-religius yang konkret. Analisis dilakukan melalui pendekatan

historis-biblis dan hermeneutika kontekstual. Pendekatan historis-biblis membantu memahami latar sosial dan religius pada masa Yesus, di mana Mahkamah Agama memainkan peran sentral dalam menegakkan hukum Yahudi namun juga rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik dan kekuasaan.

Pendekatan hermeneutika kontekstual digunakan untuk menafsirkan makna teks dalam terang realitas masa kini, khususnya dalam konteks disinformasi digital yang melanda masyarakat modern. Metode ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan isi teks secara naratif lalu menganalisisnya secara teologis. Penelitian tidak bertujuan menghasilkan data empiris, melainkan refleksi moral dan spiritual yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan iman. Dengan membaca teks Matius 26:57-68 sebagai cermin universal tentang relasi antara kebenaran dan kebohongan, penelitian ini berupaya menegaskan bahwa iman Kristen mengandung tanggung jawab etis untuk melawan setiap bentuk kepalsuan, baik dalam ruang sosial maupun digital.

2.3 Hasil Penelitian dan Diskusi

2.3.1 Analisis Struktur

Teks Matius 26:57–68 menggambarkan peristiwa pengadilan Yesus di hadapan Mahkamah Agama (Sanhedrin). Jika dibaca secara mendalam, narasi ini tersusun dalam pola kiastik (A–B–C–D–C’–B’–A’), di mana bagian tengah (D) menjadi pusat makna teologis, sementara bagian sekelilingnya memantulkan tema yang saling berkorespondensi. Pola ini menunjukkan bahwa inti perikop bukan sekadar pada tuduhan palsu itu sendiri, melainkan pada pengakuan Yesus sebagai Anak Allah yang menyingkap kebenaran di tengah kebohongan manusia.

A (ay. 57–58): Penangkapan dan pembawaan Yesus ke hadapan Imam Besar. Narasi dimulai dengan tindakan membawa Yesus ke rumah Kayafas, imam besar, di sana telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi yang menunjukkan simbol dari kekuasaan agama. Sementara itu, Petrus mengikuti dari jauh. Bagian ini menandai awal konflik antara kebenaran (Yesus) dan kekuasaan yang memanipulasi hukum. Kehadiran Petrus sebagai saksi diam di luar istana juga menciptakan kontras antara keteguhan Yesus dan keraguan manusia.

B (ay. 59–60): Pencarian saksi palsu. Bagian ini memperlihatkan niat jahat lembaga keagamaan. Mahkamah Agama secara sadar “mencari saksi palsu” agar dapat menjatuhkan hukuman mati. Pola ini menunjukkan distorsi sistemik terhadap kebenaran, di mana lembaga yang seharusnya menjadi penjaga hukum justru menjadi alat kepalsuan. Dalam konteks modern, bagian ini menggambarkan struktur sosial yang memproduksi dan menyebarkan kebohongan secara terorganisir, mirip dengan algoritma penyebar hoaks dalam dunia digital.

C (ay. 61–63a): Kesaksian yang saling bertentangan. Para saksi memberikan pernyataan yang tidak konsisten: “Orang ini berkata, Aku dapat merobohkan Bait

Allah...” tetapi kesaksian mereka tidak cocok satu sama lain. Bagian ini menggambarkan keruntuhan logika kebohongan. Seperti halnya informasi palsu di dunia digital, kebohongan tidak pernah memiliki koherensi, sifatnya rapuh dan saling meniadakan diri. Di sini Yesus tetap diam, sebuah diam yang teologis, menandakan penyerahan diri kepada kehendak Bapa.

D (ay. 63b–64): Pengakuan Yesus sebagai Anak Allah. Inilah pusat kiastik dan klimaks teologis dari perikop. Saat imam besar mendesak Yesus dengan sumpah, Yesus menjawab: “Engkau telah mengatakannya. Tetapi Aku berkata kepadamu: mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit.” Pengakuan ini adalah pernyataan kebenaran ilahi yang membongkar seluruh kebohongan pengadilan. Di tengah dunia yang dibangun atas saksi palsu, Yesus berdiri sebagai inkarnasi kebenaran yang tak tergoyahkan. Struktur kiastik menjadikan bagian ini poros keseluruhan narasi, di sinilah kebohongan manusia berhadapan langsung dengan kebenaran Allah.

C’ (ay. 65–66): Reaksi imam besar dan vonis penghujatan. Imam besar merobek pakaiannya dan menuduh Yesus menghujat Allah. Ironinya, mereka yang menuduh Yesus sebagai penghujat justru menghujat kebenaran Allah sendiri. Bagian ini mencerminkan mekanisme pembalikan moral yang lazim juga terjadi dalam dunia digital, di mana penyebar kebenaran sering difitnah, sementara penyebar kebohongan mendapat dukungan. Pola simetris antara bagian C dan C’ memperlihatkan dua bentuk “kesaksian”: kesaksian palsu dari manusia dan kesaksian sejati dari Anak Allah.

B’ (ay. 67): Kekerasan fisik dan penghinaan terhadap Yesus. Setelah keputusan dijatuhkan, mereka meludahi wajah Yesus, menampar dan memukul-Nya. Kekerasan ini merupakan manifestasi lahir dari kebohongan batiniah. Sama seperti ujaran kebencian di dunia digital yang lahir dari disinformasi, tindakan ini menunjukkan bagaimana kebohongan melahirkan kekerasan. Struktur ini mencerminkan kebalikan dari bagian B, di mana fitnah verbal kini berubah menjadi serangan fisik.

A’ (ay. 68): Pertanyaan mengejek terhadap Yesus. Narasi ditutup dengan ejekan, “Coba katakan, hai Mesias, siapakah yang memukul Engkau?” Bagian ini kembali mencerminkan pembukaan, Yesus berada di hadapan para pemimpin agama, kini bukan hanya diadili, tetapi juga dihina. Pola simetris A–A’ menunjukkan puncak penghinaan terhadap kebenaran, namun sekaligus menegaskan kemenangan moral Yesus yang tetap diam dan tidak membalas. Dalam kerangka dunia digital, bagian ini menggambarkan kondisi di mana kebenaran sering diejek, dipelintir, bahkan diserang, tetapi tetap memiliki daya tahan ilahi yang tidak bisa dihancurkan oleh fitnah.

Penting untuk dikaji lebih lanjut dari Matius 26:63b–64 yang merupakan pusat dari pola kiastik di atas, bahwasannya narasi mencapai pusat kristologinya, ketika Yesus setelah diam menghadapi berbagai tuduhan palsu, menjawab dengan serius sumpah imam besar: “Engkau telah mengatakannya. Tetapi Aku berkata kepadamu, mulai sekarang engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Kuasa dan datang dengan awan-awan sorga.” Kebenaran kristologis yang diungkapkan di sini bukanlah sekadar jawaban hukum dalam suatu persidangan, melainkan pengungkapan diri yang bersifat wahyu yang melampaui kerangka hukum yang terdistorsi.

Kebenaran kristologis ini berfungsi sebagai narasi alternatif terhadap semua tuduhan palsu yang diajukan terhadap Yesus. Dalam arti ini, teks Matius menyajikan kebenaran bukan sebagai hasil konsensus prosedural, melainkan sebagai seorang pribadi, Kristus sendiri, yang identitas-Nya pada akhirnya mengguncang dan mengatasi setiap struktur kebohongan. Menarik untuk direfleksikan juga bahwa secara teologis, “diamnya” Yesus dalam Matius 26:62–63 tidak boleh diartikan sebagai pasif, lemah, atau menyerah, melainkan sebagai tindakan nabi yang disengaja yang mengandung makna pengungkapan dan etika yang mendalam.

Dalam tradisi Alkitab, keheningan nabi itu sendiri merupakan bentuk ucapan, yang menandakan penghakiman, mengungkap ketidakadilan, dan menolak untuk melegitimasi sistem korup dengan ikut serta dalam logika yang terdistorsi. Dengan tetap diam di hadapan saksi-saksi palsu, Yesus menolak untuk masuk ke arena di mana kebenaran telah secara struktural dikecualikan. Diam-Nya mengungkap persidangan sebagai pertunjukan kekuasaan yang performatif daripada pencarian kebenaran yang sejati. Diam ini berfungsi sebagai bentuk pengorbanan kebenaran (*martyria*), yang dipahami bukan sebagai kematian fisik, melainkan sebagai kesaksian setia terhadap kebenaran meskipun kebenaran itu ditolak atau ditekan.

Yesus tidak membela diri melalui serangan retorik atau penjelasan yang tak berkesudahan, karena keterlibatan semacam itu hanya akan memperkuat kebohongan dalam kerangka komunikasi yang tidak adil. Sebaliknya, dalam diam Yesus menjaga integritas kebenaran dengan menolak untuk membiarkannya dikurangi menjadi masalah perdebatan partisan atau manipulasi prosedural. Dalam lingkungan digital yang didominasi oleh kemarahan, viralitas, dan polemik yang tidak substansial, tidak semua klaim palsu memerlukan bantahan segera. Pengorbanan kebenaran menuntut kebijaksanaan dan mengetahui kapan harus berbicara serta kapan harus diam agar kebenaran tidak tenggelam dalam kebisingan. Diamnya Yesus mengajarkan bahwa melawan disinformasi tidak selalu berarti ikut serta dalam konflik online yang tak berujung, tetapi kadang-kadang bersaksi

melalui pengendalian diri, integritas, dan keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya berdiri di atas amplifikasi algoritmik dan kekacauan diskursif.

2.3.2 Macam-Macam Penyebaran Informasi Palsu

Fenomena berita palsu tidak bersifat tunggal. Berita hoaks hadir dalam berbagai bentuk dan intensitas, mulai dari kesalahan informasi yang tidak disengaja hingga manipulasi yang dilakukan secara sistematis untuk menipu publik. Berita palsu adalah salah satu dampak negatif dari penggunaan internet dan media sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan banyaknya berita palsu yang tersebar membuat masyarakat sulit membedakan apakah informasi yang diterima itu benar atau hanya sekadar kabar burung (Rijal, Ahyani, & Basit, 2012:11).

Setidaknya ada beberapa model penyebaran informasi palsu antara lain: Pertama, misinformasi. Misinformasi adalah penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat tanpa adanya niat untuk menipu (Hidayat, 2020:22-34). Jenis ini sering muncul akibat kesalahan penafsiran, kurangnya pemahaman terhadap konteks, atau lemahnya kemampuan literasi digital seseorang. Contohnya adalah ketika seseorang membagikan berita yang sudah kadaluwarsa atau foto lama dengan narasi baru tanpa mengecek kebenarannya. Dalam dunia digital, misinformasi banyak terjadi karena kecepatan berbagi informasi lebih tinggi daripada proses verifikasi. Seorang pengguna media sosial, misalnya, dapat dengan mudah menekan tombol *share* atau *repost* hanya karena merasa informasi tersebut “terdengar benar.” Akibatnya, kesalahan kecil dapat menyebar dengan cepat dan membentuk opini publik yang keliru. Meskipun tidak memiliki niat jahat, misinformasi tetap berdampak negatif karena menumpulkan kepekaan masyarakat terhadap kebenaran.

Kedua, disinformasi. Berbeda dengan misinformasi, disinformasi adalah penyebaran informasi yang salah secara sengaja untuk menipu atau memanipulasi persepsi publik (Sumarno, 2021:22-35). Tujuan utamanya adalah menciptakan kebingungan, memecah belah masyarakat, atau mendukung kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Dalam konteks politik, disinformasi sering digunakan sebagai alat propaganda dengan menciptakan narasi yang tampak faktual namun sebenarnya direayasa. Di Indonesia, praktik disinformasi banyak ditemukan pada masa kampanye politik, di mana akun-akun anonim memproduksi konten yang menyesatkan untuk memengaruhi pilihan publik. Disinformasi merupakan bentuk kebohongan yang berstruktur karena melibatkan niat, teknologi, dan strategi komunikasi yang sistematis.

Ketiga, malinformasi. Malinformasi adalah penyebaran informasi yang sebenarnya benar tetapi digunakan dalam konteks yang menyesatkan atau dengan tujuan merugikan pihak lain (Fadhilah, 2022:108-118). Misalnya, ketika data pribadi seseorang diungkap ke publik tanpa izin atau ketika potongan informasi yang valid disajikan tanpa konteks lengkap sehingga menciptakan kesan yang salah.

Dalam politik, malinformasi sering digunakan untuk membangun citra negatif terhadap tokoh tertentu dengan memanfaatkan bagian kecil dari fakta yang diperbesar secara emosional. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebenaran pun dapat disalahgunakan bila dilepaskan dari etika dan niat baik.

Keempat, *fake news* atau berita rekayasa. Kategori ini merujuk pada berita yang sepenuhnya direkayasa, baik teks, gambar, maupun sumbernya, tanpa dasar fakta sama sekali. Tujuannya biasanya adalah keuntungan finansial melalui klik dan iklan, atau untuk memancing emosi publik. Berita rekayasa sering menggunakan gaya bahasa jurnalistik yang meyakinkan agar tampak sah. Situs-situs penyebar berita palsu biasanya memanfaatkan domain atau nama media yang mirip dengan media arus utama untuk memperdaya pembaca. Bentuk ini paling berbahaya karena menyerang kepercayaan publik terhadap media dan kebenaran itu sendiri.

Kelima, manipulasi visual dan audio (*deepfake*). Dalam perkembangan teknologi terkini, muncul bentuk berita palsu berbasis manipulasi visual atau audio, dikenal dengan istilah *deepfake* (Anwar, 2020:234-243). Teknologi ini menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan video, suara, atau gambar yang sangat realistis, seolah-olah seseorang melakukan hal yang tidak pernah terjadi. Bentuk ini menimbulkan ancaman besar terhadap kredibilitas media dan reputasi individu. Ketika video palsu dapat dibuat dengan sangat meyakinkan, batas antara kenyataan dan kebohongan menjadi kabur. Fenomena ini menunjukkan bahwa produksi berita palsu kini tidak hanya masalah etika komunikasi, tetapi juga tantangan ontologis terhadap konsep “kebenaran” itu sendiri.

Maraknya hoaks di dunia maya ini bahkan dapat menular menjadi konflik ke dunia nyata. Hal inilah yang kemudian menyebabkan peningkatan kegaduhan, karena konflik yang terjadi adalah konflik horizontal di tengah masyarakat (Yani, 2019:16-17). Berbagai macam berita palsu juga menunjukkan bahwa kepalsuan tidak selalu muncul dalam bentuk kebohongan langsung. Berita palsu bisa hadir melalui setengah kebenaran atau konteks yang diselewengkan. Dalam semua bentuknya, berita palsu merusak struktur kepercayaan sosial dan menurunkan nilai kejujuran dalam komunikasi.

2.3.3 Relevansi Matius 26:57-68 bagi Maraknya Informasi Palsu dalam Dunia Digital

Dalam perspektif teologis, produksi informasi palsu di dunia digital memiliki kesamaan struktural dengan tuduhan palsu terhadap Yesus dalam Matius 26:57-68. Keduanya berakar pada kepentingan kekuasaan yang menindas kebenaran. Perikop Matius 26:57-68 menampilkan sebuah ironi religius yang sangat mendalam. Yesus, Sang Kebenaran yang sejati (Yoh. 14:6), dihadapkan kepada lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi penjaga kebenaran, tetapi justru menjadi alat bagi ketidakadilan. Mahkamah Agama Yahudi (Sanhedrin) yang

dipimpin oleh Imam Besar Kayafas berperan sentral dalam proses penyaliban Yesus. Menurut hukum Yahudi, Sanhedrin memiliki kewenangan untuk mengadili perkara keagamaan, namun dalam kasus Yesus, lembaga ini menyalahgunakan otoritasnya untuk tujuan politis dan religius, yaitu mempertahankan *status quo* dan mengamankan posisi kekuasaan dari ancaman ajaran Yesus yang radikal dan membebaskan. Dengan demikian, tuduhan palsu terhadap Yesus bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap kebenaran itu sendiri.

Ketika peristiwa ini dibaca dalam terang dunia modern, ditemukan kesamaan pola antara mekanisme tuduhan palsu di masa Yesus dan fenomena penyebaran informasi palsu di era digital. Dunia digital kini menjadi ruang baru di mana kebenaran sering kali dikaburkan oleh kepentingan ekonomi, politik, maupun ideologis. Hoaks bekerja dengan logika yang sama seperti kesaksian palsu, yakni menyusun narasi yang tampak benar, tetapi mengandung kebohongan yang sistematis untuk menyesatkan opini publik. Sama seperti imam-imam kepala yang menggunakan saksi palsu untuk membangun legitimasi moral terhadap keputusan mereka, demikian pula pelaku penyebar hoaks sering kali menggunakan “sumber palsu” atau “data manipulatif” untuk membenarkan kepentingan tertentu. Dalam kedua konteks itu, kebohongan tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil rekayasa yang sadar dan terencana.

Masalah dan penyebaran informasi palsu atau hoaks masih saja terjadi dan bahkan telah menimbulkan dampak serius terhadap tatanan masyarakat Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa ribuan hoaks beredar setiap tahun, mencakup isu politik, kesehatan, agama, dan sosial. Isu yang paling besar diantaranya adalah isu tentang kesehatan. Sebagian besar hoaks kesehatan di Indonesia terus mengulang misinformasi terkait Covid-19. Misalnya, klaim palsu tentang asal-usul virus, efek vaksin, atau langkah pencegahan. Hal ini mencerminkan ketidaksepahaman dan kurangnya kepercayaan publik yang berkelanjutan dari periode tersebut. Data semacam ini memperlihatkan bahwa hoaks sering kali menimbulkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, kebencian, perpecahan, bahkan kekerasan. Kendati demikian dampaknya, masih saja ada oknum yang memiliki keinginan untuk memutarbalikan kebenaran hanya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Implikasi etis bagi Gereja dalam menghadapi misinformasi kesehatan semacam ini adalah Gereja perlu berhati-hati dalam membangun komunikasi, artinya alih-alih memperkuat spekulasi atau ketakutan, Gereja dapat menjadi teladan komunikasi yang bertanggung jawab dengan menyediakan informasi yang dapat diandalkan, mendorong konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional, dan mencegah debat yang menghakimi dan merusak kebenaran atau memicu perpecahan. Dalam konteks ini, refleksi atas peristiwa tuduhan palsu terhadap Yesus memberikan pelajaran moral yang relevan. Sama seperti Mahkamah Agama

yang menyelewengkan hukum untuk membenarkan kebohongan, masyarakat modern juga rentan menggunakan teknologi untuk memanipulasi opini dan menghancurkan reputasi orang lain. Dengan demikian, peristiwa dalam Matius 26:57–68 tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga mengajak umat untuk bertobat dari dosa kolektif berupa penyebaran kebohongan yang menodai martabat manusia.

Selain itu, sikap Yesus dalam menghadapi fitnah juga menyampaikan pesan spiritual yang mendalam bagi dunia digital. Yesus tidak membalas tuduhan palsu dengan kebohongan baru. Yesus tidak mengandalkan retorika atau argumentasi untuk membela diri, melainkan menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Diamnya Yesus bukan tanda ketakutan, melainkan bentuk solidaritas dengan mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Dalam konteks digital, sikap ini menjadi teladan bagi umat beriman untuk tidak terjebak dalam arus balas dendam verbal atau perdebatan yang tidak membawa kebenaran. Dalam diam Yesus terdapat kekuatan kasih yang menyembuhkan dan membebaskan. Kebenaran tidak selalu harus dibuktikan dengan kata-kata, melainkan dengan kesetiaan dan integritas hidup.

Relevansi lain yang dapat ditarik dari teks ini adalah perlunya membangun budaya literasi digital yang berlandaskan nilai iman. Dunia digital tidak hanya membutuhkan pengguna yang cerdas secara teknologi, tetapi juga bijaksana secara moral dan spiritual. Kebenaran Kristus seharusnya menjadi dasar etis bagi penggunaan media sosial, berita daring, dan komunikasi digital. Gereja dan lembaga pendidikan Kristen memiliki tanggung jawab pastoral untuk mendidik umat agar kritis terhadap informasi yang diterima dan tidak mudah terprovokasi oleh kebohongan yang terselubung. Kesetiaan kepada Kristus berarti juga kesetiaan terhadap kebenaran di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia digital yang menjadi ruang kesaksian iman zaman ini.

Dari penggarapan teologis atas teks Matius 26:57-68 penulis menarik semacam model kerangka etika yang kiranya dapat menjadi acuan bagi kita dalam menghadapi informasi palsu dalam dunia digital. Model pertama adalah perlu membangun etika kebenaran Kristus. Etika ini akan berupaya membantu kita dalam menentang bias konfirmasi dengan jujur. Dalam Matius 26:57–68 terdapat kontras dramatis antara kebohongan yang dibuat-buat dan kebenaran Kristologis. Saksi-saksi palsu berbicara dalam sistem tertutup yang didorong oleh bias konfirmasi; kesaksian dicari bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk mengonfirmasi keputusan yang sudah diambil. Di hadapan ini, Yesus mewakili kebenaran bukan sebagai argumen strategis, tetapi sebagai pengungkapan diri yang setia di hadapan Allah. Pengakuannya (ay. 63b–64) mengungkapkan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh konsensus mayoritas atau otoritas institusional, tetapi oleh kesetiaan terhadap wahyu Allah. Jika diterjemahkan ke dalam etika digital, ini menjadi etika kejujuran yang secara aktif menentang bias konfirmasi.

Orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk menghindari kebohongan, tetapi untuk menentang godaan untuk membagikan informasi hanya karena sesuai dengan preferensi ideologis, politik, atau agama. Etika kejujuran menuntut kejujuran intelektual, kerendahan hati di hadapan fakta, dan kesediaan untuk membiarkan kebenaran yang tidak nyaman menantang asumsi sendiri. Pengaplikasian model etika ini kiranya dikatakan sebagai upaya pembentukan karakter Kristiani. merupakan sifat-sifat yang terkandung dalam ajaran dan teladan hidup Yesus Kristus (Jatmiko & Wilhelmus, 2024:262).

Model kedua adalah membangun etika kasih dan pembangunan. Narasi pengadilan mengungkapkan bagaimana kesaksian palsu memecah belah komunitas dan melegitimasi kekerasan. Tanggapan Yesus yang ditandai dengan pengendalian diri, diam, dan ucapan yang terukur, mencegah eskalasi dan menjaga integritas cinta bahkan di bawah ketidakadilan. SikapNya mencerminkan etika yang berakar pada cinta yang memenuhi hukum, di mana komunikasi diarahkan pada kehidupan, bukan dominasi. Ketika diterapkan dalam dunia digital, sikap Yesus menjadi etika komunikasi konstruktif. Penggunaan media harus bertujuan untuk membangun, bukan untuk memermalukan, memecah belah, atau menghancurkan reputasi. Bahkan saat menghadapi kebohongan, komunikasi harus bersifat pemulihan, proporsional, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Etika ini menolak kemarahan yang bersifat performatif dan keunggulan moral, melainkan menegaskan bahwa kebenaran harus disampaikan dengan cara yang konsisten dengan kasih Kristus. Dalam arti ini, komunikasi digital menjadi tempat kesaksian etis, di mana kasih menguasai tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana dan mengapa hal itu dikatakan.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Matius 26:57–68 bukan hanya catatan naratif tentang pengadilan Yesus, tetapi juga menyediakan kerangka teologis dan etis yang kaya untuk menafsirkan fenomena informasi palsu di dunia digital saat ini. Secara singkat, ada tiga temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini, yakni: Pertama, temuan eksegetis (sifat tuduhan palsu). Analisis eksegetis menunjukkan bahwa tuduhan yang diajukan terhadap Yesus bersifat sistematis, disengaja, dan diproduksi secara institusional. Kesaksian palsu tidak muncul sebagai kesalahan yang tidak disengaja, melainkan sebagai hasil dari proses peradilan yang telah meninggalkan komitmennya terhadap kebenaran. Kesunyian Yesus dan pengakuan kristologis-Nya yang tegas mengungkapkan kontras yang tajam antara “kebenaran” yang dimanipulasi dan didorong oleh kekuasaan dengan kebenaran ilahi yang berakar pada wahyu diri Allah.

Kedua, temuan berdasarkan analisis kontekstual (perbandingan dengan hoaks digital). Konspirasi mahkama agama dalam Matius 26:57–68 menunjukkan kesamaan struktural yang mencolok dengan dinamika hoaks digital saat ini, ruang digital, bias konfirmasi, dan mekanisme disinformasi mencerminkan lingkungan tertutup di mana kesaksian dipilih untuk melegitimasi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kedua konteks tersebut, kebenaran dikorbankan demi kekuasaan, ketakutan, dan kebutuhan akan kontrol, bukan dicari dan diverifikasi secara kritis. Ketiga, implikasi teologis dan etis (spiritualitas komunikasi). Perikop ini menawarkan visi dasar untuk spiritualitas Kristiani dalam komunikasi yang menekankan kejujuran, penilaian kritis, dan komunikasi konstruktif yang berakar pada kasih.

Narasi ini menyerukan Gereja untuk memberikan kesaksian yang setia terhadap kebenaran di ruang digital dengan menentang penyebaran informasi palsu, mempraktikkan verifikasi yang bertanggung jawab, dan menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk membangun daripada menghakimi atau memecah belah. Dengan cara ini, Matius 26:57–68 muncul sebagai sumber teologis yang vital untuk mengatasi tantangan etis yang ditimbulkan oleh disinformasi di ruang publik digital kontemporer. Menentang kebohongan (hoaks) adalah panggilan Gereja sekaligus tantangan yang dihadapi terutama bagaimana Gereja dapat mempertahankan identitas dan ajarannya dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Akhirnya, Gereja perlu beradaptasi dengan pluralitas konteks sehingga kebijakan dan karya pastoral yang ditetapkan sungguh berakar dan menjawab konteks kehidupan umat.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diberikan beberapa saran: pertama, perlu mengembangkan literasi media yang berlandaskan nilai iman, agar masyarakat mampu membedakan antara fakta dan manipulasi dengan kebijaksanaan rohani, sehingga informasi digunakan untuk membangun, bukan merusak. Kedua, perlu melakukan studi lanjutan menganalisis peran pemimpin agama dan institusi Gereja dalam membentuk sikap publik terhadap kebenaran di ruang digital. Hal ini termasuk mengkaji bagaimana khotbah, katekese, dan komunikasi resmi Gereja untuk meredam dan meruntuhkan narasi palsu. Ketiga, perlu melakukan penelitian komparatif atau interdisipliner untuk mengeksplorasi bagaimana narasi Alkitab tentang kesaksian palsu dan kebenaran, selain Matius 26:57-68, berinteraksi dengan teori-teori kontemporer tentang etika komunikasi, sosiologi digital, dan studi kecerdasan buatan. Pendekatan ini akan memperdalam keterlibatan teologis dengan bentuk-bentuk manipulasi yang berkembang pesat, termasuk konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, dan berkontribusi pada

respons etis teologi Kristiani yang lebih kokoh terhadap tantangan ruang publik digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, A., & Hidayat, R. (2022). Bias konfirmasi dan literasi digital di kalangan pengguna media sosial. *Jurnal Kajian Literasi Digital*, 4(1), 55–70.
- Anjaya, C. E., Fernando, A., & Arifianto, Y. A. (2021). Penderitaan Kristus dalam formasi spiritual yang mengedukasi orang percaya. *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 8(1), 1–11.
- Anwar, A. (2020). Fake news sebagai tantangan demokrasi digital. *Jurnal Komunikasi Politik*, 9(2), 45–60.
- Brown, R. E. (1994). *The death of the Messiah* (Vol. 1). Doubleday.
- Dimasejati, F. (2021). Rendahnya literasi digital dan penyebaran hoaks di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam*, 9(1), 44–59.
- Fadhilah, L. (2022). Fenomena malinformasi dan manipulasi fakta di media sosial Indonesia. *Jurnal Komunikasi Massa*, 7(2), 101–118.
- Hidayat, R. (2020). Misinformasi dan tantangan etika komunikasi di era digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 22–34.
- Jatmiko, R. T., & Wilhelmus, O. R. (2024). Pengajaran agama Katolik menumbuhkan karakter Kristiani kasih, rela berkorban, dan damai pada diri siswa. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 24(2), 255–268.
- Jeremias, J. (1969). *Jerusalem in the time of Jesus*. Fortress Press.
- Jewadut, J. L., & Nirmala, F. R. (2023). Peran komunitas basis gerejawi bagi efektivitas pelaksanaan karya pastoral partisipatif dan kontekstual. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 23(2), 215–231.
- Keener, C. S. (2009). *The Gospel of Matthew: A socio-rhetorical commentary*. Eerdmans.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Hingga akhir 2023, Kemenkominfo tangani lebih dari 12 ribu hoaks. Diakses 4 November 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita/3898749/hingga-akhir-2023-kemenkominfo-tangani-12-ribu-lebih-hoaks>

- Leliana, I., et al. (2023). Etika dalam era deepfake: Bagaimana menjaga integritas komunikasi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 22(2), 234–243.
- Nurdin, R. (2021). *Trolls, disinformasi, dan strategi kampanye: Tantangan demokrasi digital dalam Pemilu 2024*. KPU Press.
- Nurudin, & Irwansyah. (2020). Media baru dan pergeseran otoritas kebenaran informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia*, 13(2), 145–160.
- Pidyarto, H. (2018). *Kisah sengsara Yesus menurut Injil Matius* (Cet. II). Karmelindo.
- Rijal, M. B., Ahyani, H., & Basit, A. (2012). Bahaya hoaks dalam membangun masyarakat madani di era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 13(1), 1–26.
- Siswoko, K. H. (2017). Kebijakan pemerintah menangkal penyebaran berita palsu atau hoaks. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 13–19.
- Sumarno. (2021). Ekonomi klik dan produksi hoaks di media sosial. *Jurnal Tadbiruna*, 8(1), 22–35.
- Tio, T. (2025). Eklesiologi Katolik: Tantangan dan peluang dalam era digital. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 25(1), 203–212.
- Yani, C. (2019). Pencegahan hoaks di media sosial guna memelihara harmoni sosial. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 15–21.
- Zabieno, A. S., Damayanti, D., & Abdullah, A. Z. (2025). The role of AI, filter bubbles, and echo chambers in political and religious polarization on social media. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 102–118.